



MAHKAMAH AGUNG RI

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Jln. Medan Merdeka Utara No. 9 - 13 Tlp. (+6221) - 3843348, 3810350, 3457661
Tromol Pos No. 1020 - Jakarta 10110

Nomor : 223 / BUA.4 / PL.07 / 05 / 2019
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Eks.
Hal : Permintaan dokumen RKBMN

Jakarta, 22 Mei 2019

Kepada Yth.

1. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung
3. Para Sekretaris Badan di Lingkungan Mahkamah Agung
4. Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung
5. Koordinator Wilayah pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan Se-Indonesia di Tempat.

Menindaklanjuti surat dari Direktur Barang Milik Negara DJKN Kementerian Keuangan No. S-1012/KN/2019 tanggal 13 Mei 2019 perihal Pemberitahuan jadwal penyampaian Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) untuk Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Tahun Anggaran 2021 (terlampir), dengan ini diinformasikan bahwa RKBMN disampaikan paling lambat pada tanggal 18 Oktober 2019 dan harus dilengkapi antara lain :

1. Pengajuan RKBMN tersebut melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) ;
2. RKBMN yang diajukan dalam bentuk *hard copy* dan sudah ditandatangani serta stempel dari masing-masing Pengguna Barang (Asli) dan mengedepankan *zero mistake*;
3. Untuk Satker yang mengajukan Usulan Pengadaan Rumah Negara agar dilampirkan data dukung berupa hasil konsultasi dengan Dinas Pekerjaan Umum setempat terkait dengan Pembangunan Rumah Negara.

Mengingat pentingnya data tersebut dapat dikirim dalam bentuk *hard copy* dan dimohon agar kelengkapannya segera dikirimkan kepada Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung paling lambat 1 Agustus 2019. Apabila melewati tanggal tersebut akan dianggap tidak mengajukan RKBMN Tahun anggaran 2021. (Contact Person : PB Wilayah I Hp. 0856 7148884 David Achmad Wijaya dan PB Wilayah II Hp. 0812 98799006 Arif Hidayat).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Kepala Biro Perlengkapan,

Rosfiana, S.H., M.H.

Tembusan Yth. :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
3. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI;
4. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung;
5. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi BUA Mahkamah Agung;
6. Kepala Biro Keuangan BUA Mahkamah Agung.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

GEDUNG SYAFRUDIN PRAWIRANEGARA LT. 10 UTARA, JL. LAPANGAN BANTENG TIMUR 2-4, JAKARTA 10710
TELEPON : (021) 34831324 EXT 4531; FAKSIMILE : (021) 3448390; SITUS HTTP://WWW.DJKN.DEPKEU.GO.ID

Nomor : S- 1012 /KN/2019
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Pemberitahuan Jadwal Penyampaian
Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)
untuk Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga
(RKA-K/L) Tahun Anggaran 2021

13 MAY 2019

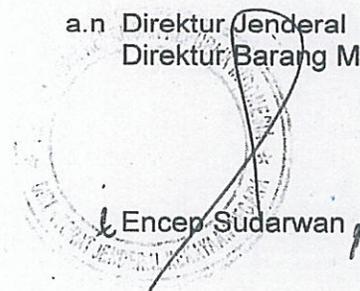
Yth. Daftar Terlampir

Memperhatikan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara dan Diktum PERTAMA huruf b Keputusan Menteri Keuangan Nomor 127/KM.6/2015 tentang Tahapan Pelaksanaan Penyusunan dan Penelaahan RKBMN pada Kementerian/Lembaga yaitu mengenai tahapan pelaksanaan penyusunan dan penelaahan RKBMN pada seluruh Kementerian/Lembaga, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Sebagaimana Saudara maklum, Pengguna Barang menyampaikan dokumen RKBMN secara lengkap kepada Pengelola Barang paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun anggaran sebelumnya. Selanjutnya, Hasil Penelaahan RKBMN harus disampaikan Pengelola Barang kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Anggaran paling lambat minggu ketiga bulan Februari tahun anggaran sebelumnya.
2. Pelaksanaan penyusunan RKBMN di Pengguna Barang dan Penelaahan RKBMN di Pengelola Barang hendaknya dapat dilakukan dengan mengedepankan *prudent principal* dan *zero mistake*.
3. Dalam rangka memastikan kualitas dan menjamin ketepatan waktu penyampaian RKBMN untuk RKA-K/L Tahun Anggaran 2021, berikut kami sampaikan jadwal penyampaian RKBMN kepada Pengelola Barang pada seluruh Kementerian/Lembaga, sehingga kiranya dapat Saudara pedomani.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n Direktur Jenderal
Direktur Barang Milik Negara


Encep Sudarwan

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Kekayaan Negara
2. Seluruh APIP Kementerian/Lembaga

Lampiran I

Surat Nomor : S- 1012 /KN/2019

Tanggal : 13 MAY 2019

A. Penyampaian RKBMN sampai dengan 18 Oktober 2019

1. 002 - Dewan Perwakilan Rakyat
2. 005 - Mahkamah Agung
3. 013 - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
4. 020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. 035 - Kementerian Koordinator Perekonomian
6. 041 - Kementerian Badan Usaha Milik Negara
7. 047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8. 048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara/Reformasi Birokrasi
9. 055 - Kementerian PPN/BAPPENAS
10. 064 - Lembaga Ketahanan Nasional
11. 067 - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
12. 075 - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
13. 081 - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
14. 084 - Badan Standardisasi Nasional
15. 086 - Lembaga Administrasi Negara
16. 089 - Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
17. 090 - Kementerian Perdagangan
18. 092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
19. 093 - Komisi Pemberantasan Korupsi
20. 100 - Komisi Yudisial
21. 106 - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
22. 109 - Badan Pengembangan Wilayah Suramadu
23. 113 - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
24. 115 - Badan Pengawas Pemilihan Umum

B. Penyampaian RKBMN sampai dengan 1 Nopember 2019

1. 004 - Badan Pemeriksa Keuangan
2. 018 - Kementerian Pertanian
3. 024 - Kementerian Kesehatan
4. 029 - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5. 034 - Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan
6. 044 - Kementerian Koperasi dan UKM
7. 052 - Dewan Ketahanan Nasional
8. 059 - Kementerian Komunikasi dan Informatika
9. 063 - Badan Pengawas Obat dan Makanan
10. 077 - Mahkamah Konstitusi
11. 080 - Badan Tenaga Nuklir Nasional
12. 082 - Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
13. 083 - Badan Informasi Geospasial
14. 085 - Badan Pengawas Tenaga Nuklir
15. 107 - Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan/BASARNAS
16. 108 - Komisi Pengawas Persaingan Usaha
17. 114 - Sekretariat Kabinet
18. 121 - Badan Ekonomi Kreatif